



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggungjawab:
Djustiawan Widjaya
Tim Penulis:
Achmad Yugo Pidhegso
Mochammad Ramadhan

Problematika Pembangunan BTS 4G Daerah *Blankspot*

Isu Strategis

Pemerataan penyediaan internet sangat penting bagi seluruh negara termasuk Indonesia, Manyika dan Roxburgh (2011) menyatakan bahwa internet berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi bahkan dijelaskan bahwa jika internet adalah sebuah sektor, maka sektor internet akan memiliki kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Internet pada era digital saat ini menjadi salah satu sarana penyaluran informasi, maka hak untuk mendapatkan akses internet ini menjadi penting untuk dipenuhi oleh negara.

Dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia dalam mendapatkan akses ke saluran internet dan dalam rangka percepatan transformasi digital, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pembangunan infrastruktur digital, ekosistem digital, regulasi dan pengembangan talenta digital serta informasi dan komunikasi publik. Adanya transformasi digital diharapkan dapat menghadirkan manfaat perkembangan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur digital pada Kemenkominfo salah satunya adalah penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah non-komersial termasuk 3T dalam rangka pemerataan akses 4G. Dalam menyediakan infrastruktur internet, Kemenkominfo memiliki program penyediaan BTS di daerah *blankspot* dan juga program Palapa Ring. Kemenkominfo memiliki target memasang BTS pada 5.052 desa dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024.

Program ini sejalan dengan salah satu dari 5 (lima) Arahan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 yaitu pembangunan infrastruktur dimana didalamnya termasuk infrastruktur TIK untuk transformasi digital. Program ini dijalankan dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan digital, juga diharapkan dapat menyediakan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan publik. Besarnya manfaat program penyediaan BTS di area *blankspot* ini perlu untuk mendapatkan pengawasan secara menyeluruh oleh seluruh *stakeholder* agar tujuan program untuk memenuhi hak warga negara Indonesia akan akses saluran internet dan percepatan transformasi digital dapat tercapai. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan BTS baik dari permasalahan akuntabilitas sampai dengan adanya tindakan beberapa oknum yang memperkaya diri dari anggaran program ini.

2023

Komisi I

Potensi *Dispute* akibat Tidak Sesuai Lokasi BTS

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo memiliki aplikasi bernama *Asset Management System* (AMS) yang digunakan untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan proyek BTS 4G. AMS dapat memonitor perkembangan pembangunan BTS dari tahap awal sampai akhir dan terdapat keterangan lokasi pembangunan BTS. Terkait dengan lokasi, informasi ini juga tertuang dalam kesepakatan berupa kontrak antara BAKTI dengan penyedia. Namun, pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkominfo Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkapkan adanya perbedaan lokasi BTS antara AMS dengan kontrak bahkan terdapat BTS yang tercatat dalam AMS namun tidak ditemukan dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. Perbedaan Lokasi Pembangunan BTS

No	Nama Paket	Lokasi pada Kontrak	Lokasi pada AMS
1	Paket 2 <i>Batch</i> 1A	Batuawu	Langkema
2	Paket 2 <i>Batch</i> 1B	Wamsoba	Waly
3	Paket 2 <i>Batch</i> 1B	Waprea	Fafan Lalen
4	Paket 3 <i>Batch</i> 1A	Kaladum	Klatim
5	Paket 3 <i>Batch</i> 1A	Klana	Susyom
6	Paket 3 <i>Batch</i> 1A	Meriambeker	Klasbon
7	Paket 3 <i>Batch</i> 1A	Warbo	Baryambeker
8	Paket 3 <i>Batch</i> 1B	Mamarimp	Wabuayar
9	Paket 3 <i>Batch</i> 1B	Rondepi II	Baisore
10	Paket 4 <i>Batch</i> 1A	Higisyam	Bensor
11	Paket 4 <i>Batch</i> 1A	Manggaleso	Mogonik
12	Paket 4 <i>Batch</i> 1A	Meagama	Kugab

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkominfo Tahun Anggaran 2021

Tabel. Lokasi BTS yang Tidak Ditemukan dalam Kontrak

No	Paket 4 <i>Batch</i> 1B	Paket 5 <i>Batch</i> 1A		Paket 5 <i>Batch</i> 1B
1	Guna	Bipim	Habie Hilir	Amgotro 2
2	Higisyam	Kalimo	Hambulang	Pue
3	Dagai 2	Kamno Sari	Kali Rona	Suagai
4	Koli	Afkab Makmur	Kami Karo	Wembi 2
5	Walelo	Kirely	Kapauri Bawah	
6	Yandono	Arintap	Kapawi	
7	Anggutare	Muara II	Kimyal Yali	
8		Tomondua	Momuna	
9		Worowi	Nonggorok	
10		Yuktanggo	Paesa Meteor	
11		Suerlihim	Salak Tibul	
12		Benawa	Walialo	
13		Benawa Punu	Weni	
14		Baruku	Sohoram	

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkominfo Tahun Anggaran 2021

Permasalahan terkait lokasi BTS tidak sesuai dengan kontrak berpotensi menimbulkan *dispute* antara BAKTI dengan penyedia yang dapat berujung dengan permasalahan hukum yang dapat menyebabkan proyek tidak dapat dibayarkan di kemudian hari.

Kasus Korupsi Pembangunan BTS 4G

Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 (lima) orang tersangka terkait kasus korupsi pembangunan menara BTS yang dilaksanakan oleh BAKTI Kemenkominfo. Tersangka dalam kasus ini berasal dari pejabat di BAKTI Kemenkominfo, Direksi dan Komisaris Penyedia, dan Tenaga Ahli dari salah satu Universitas Negeri ternama di Indonesia. Terkait dengan kasus ini, kerugian negara sedang dilakukan perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun statement yang dilontarkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) yaitu Bapak Kuntadi menyebutkan bahwa dari nilai kontrak Tahap I sebesar Rp10 Triliun, kerugian negara akibat korupsi tersebut ditaksir kurang lebih Rp1 triliun, dengan kata lain korupsi proyek BTS ini dapat merugikan negara sebesar 10% dari keseluruhan nilai kontrak, padahal RPJMN tahun 2020 - 2024 menjelaskan bahwa indikasi pendanaan proyek pembangunan BTS 4G mencapai Rp435,2 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

Tentunya harapan rakyat Indonesia bahwa praktik korupsi ini hanya terjadi di kontrak yang saat ini telah diungkap oleh Kejaksaan Agung. Namun jika praktik ini juga terjadi di kontrak-kontrak lain dalam proyek pembangunan BTS 4G, maka rakyat Indonesia harus siap untuk menerima kenyataan bahwa proyek yang dilaksanakan untuk memenuhi hak warga negara Indonesia akan akses internet ini membuat beberapa oknum menjadi lebih kaya sekaligus merugikan negara hingga puluhan triliun.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dalam upaya memberikan pemerataan akses internet dan mempercepat transformasi digital, Komisi I DPR RI diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta BPK RI melakukan Audit Investigatif terkait proyek Pembangunan BTS 4G.
2. Meminta Kemenkominfo untuk dapat memberikan penjelasan terkait kasus korupsi dan memaparkan perbandingan target dan realisasi pembangunan BTS 4G dalam Rapat Kerja.
3. Mendorong Kemenkominfo untuk melakukan penyesuaian dalam sistem AMS dan melakukan addendum kontrak pembangunan BTS 4G jika diperlukan untuk menghindari adanya permasalahan hukum akibat perbedaan antara data BTS dalam AMS dengan kontrak.

Referensi

BPK RI. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021*. Jakarta.

Kompas. 2023. "Bertambah lagi, Total ada 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo". *Artikel*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/07/11375231/bertambah-lagi-total-ada-5-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-bts-4g-bakti-pada-8-februari-2023>.

Manyika, James dan Charles Roxburgh. 2011. *The great transformer: The Impact of the Internet on economic growth and prosperity*. Mckinsey Global Institute.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta.

Utoyo, Donny Budi. 2015. *Internet, Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Elsam. Jakarta.